

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Sistem otonomi daerah merupakan suatu sistem yang memberikan hak wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat baik dalam hal keuangan maupun non keuangan. Tujuan dari sistem otonomi daerah tersebut yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta agar masyarakat dapat mengontrol dan memantau penggunaan dana alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada pelaksanaan sistem otonomi daerah ini pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah Kota/Kabupaten untuk mengelola dan mengatur pemerintahan daerah baik dari segi pembuatan kebijakan maupun sumber pembiayaan program. Sumber pembiayaan yang utama bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berlandaskan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang

berguna untuk membantu pembiayaan pelaksanaan program otonomnya, yang mampu mengatur urusan rumah tangganya sendiri selain dari penerimaan dana yang berasal dari pemerintah pusat atau subsidi bantuan. Selain itu, retribusi daerah juga merupakan penarikan pungutan pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan. Adapun objek retribusi berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Objek retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan Kota Bandung yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Adapun objek retribusi jasa umum yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis retribusi pengujian kendaraan bermotor. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan yang diberikan atas pengujian kendaraan bermotor yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di bidang Perhubungan pada Pasal 207 disebutkan bahwa jenis kendaraan yang termasuk ke dalam subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu mobil barang, bus, *tractor head*, kereta gandengan, kereta tempelan, mobil penumpang, dan sepeda motor.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menjadikan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan pernyataan di atas peneliti mendapatkan data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung mengenai target dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Anggaran
2013	6.887.000.000	5.438.314.700	(1,448,685,300)
2014	6.837.000.000	5.464.529.000	(1,372,471,000)
2015	8.202.500.000	5.502.006.200	(2,700,493,800)
2016	8.235.315.000	4.875.361.900	(3,359,953,100)
2017	9.000.000.000	4.667.483.800	(4,332,516,200)

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung (Data diolah peneliti 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa target realisasi pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih kurang baik dalam pengelolaannya sehingga terjadi selisih antara target anggaran dan realisasinya. Target anggaran pada setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sedangkan pada realisasinya hanya mengalami sedikit kenaikan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar Rp. 626.644.300 dan pada tahun 2017 kembali menurun

sebesar Rp. 207.878.100. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan jumlah target anggaran retribusi dan penurunan jumlah kendaraan yang diuji.

Adapun jumlah kendaraan yang telah diuji oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung selama kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Kendaraan Yang Diuji Oleh Dinas Perhubungan

Kota Bandung Tahun 2013-2017

Tahun	Kategori Kendaraan Yang Diuji		Jumlah
	Umum	Tidak Umum	
2013	18.102	77.305	95.407
2014	19.526	78.874	98.400
2015	19.230	79.601	98.831
2016	17.053	74.702	91.755
2017	10.991	53.892	64.883
Total Jumlah	84.902	364.374	449.276

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung (Data diolah peneliti 2018)

Data di atas menunjukkan bahwa pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kota Bandung selalu mengalami fluktuasi. Kecilnya pencapaian pendapatan tidak sebanding dengan target yang telah ditentukan. Penetapan target retribusi terlalu besar dan terus meningkat pada setiap tahunnya, sedangkan pada realisasinya cenderung menurun. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam

mengelola pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kota Bandung pada tahun 2013-2017. Sehingga berdampak pada tidak ter-realisasinya target yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian data dan latar belakang masalah retribusi pengujian kendaraan bermotor Kota Bandung yang diperoleh oleh peneliti. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang evaluasi permasalahan pengelolaan dan pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Alasan peneliti memilih topik tersebut sebagai objek penelitian ini karena evaluasi merupakan bagian dari kajian administrasi yang berguna untuk menilai sejauh mana hasil dari suatu kebijakan dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan target yang ditentukan. Sedangkan retribusi merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan yang berguna sebagai salah satu unsur pendapatan dan sumber dana untuk menjalankan kegiatan administrasi publik.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini yaitu:

**EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013-
2017.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan dan pengolahan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa pencapaian target retribusi pengujian kendaraan bermotor Kota Bandung selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai 2017 masih di bawah 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kota Bandung.
2. Diketahui bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013-2017 pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kota Bandung tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga menyisakan anggaran pada setiap tahunnya.
3. Diketahui bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013-2017 target pendapatan retribusi selalu mengalami kenaikan.
4. Diketahui bahwa realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017 selalu mengalami fluktuasi dalam artian selalu naik-turun.
5. Diketahui bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sampai tahun 2017 pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kota Bandung masih mengalami penurunan pada setiap tahunnya.
6. Realisasi pencapaian target anggaran yang kurang optimal mengakibatkan kerugian karena anggaran merupakan salah satu penunjang pembangunan daerah.

7. Masih kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan retribusi.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan data awal yang penulis paparkan di atas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dan menganalisis evaluasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun anggaran 2013-2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana evaluasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2013-2017?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penguraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui evaluasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2013-2017.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi penelitian di bidang Administrasi Publik khususnya mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lainnya yang berminat untuk meneliti hal yang sama mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Administrasi Publik dalam melakukan penelitian mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan sarana implementasi teori-teori yang telah diterima oleh peneliti selama perkuliahan dan sarana peningkatan pengetahuan dan wawasan khususnya dalam hal pengelolaan retribusi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terutama Dinas Perhubungan Kota Bandung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah khususnya retribusi pengujian kendaraan bermotor.

G. Kerangka Pemikiran

Chandler & Plano dikutip Pasolong (2014: 7) menjelaskan tentang administrasi publik sebagai

“seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur ‘*public affairs*’ dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.”

Pada pelaksanaannya, administrasi publik tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan keuangan yang merupakan hal penting dalam menjalankan organisasi dan urusan publik. Dalam hal ini keuangan negara termasuk kedalam hal penting dan mendasar dalam melaksanakan administrasi publik.

Anggara (2016: 11) menjelaskan bahwa keuangan negara merupakan

“kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan maupun institusi lainnya. Secara ringkas, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara.”

Salah satu penunjang keuangan negara bersumber dari pendapatan. Dalam mengukur tingkat efektivitas pendapatan dibutuhkan suatu evaluasi, William N. Dunn (2000: 610) dalam bukunya “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut.

1. Efektivitas

William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan.

2. Efisiensi

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik sangat sederhana, sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai, berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik adalah tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi berbagai hal.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respons dari suatu aktivitas, yaitu tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Retribusi daerah merupakan salah satu unsur yang menjadi sumber pendapatan yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 109 disebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ada beberapa jenis objek retribusi jasa umum, salah satunya yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

H. Proposisi

Evaluasi pendapatan asli daerah pada jenis retribusi jasa umum pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pelaksanaannya akan baik berdasarkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.

